

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang

memakai produk tersebut. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya (www.pajakppn.blogspot.co.id).

3.1.2 Pengertian Pajak Masukan (PPN Masukan)

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (www.kabarpajak.com)

Tata cara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

3.1.3 Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Pernyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

Perhitungan pajak masukan berdasarkan PMK No 78/PMK.03/2010 ini praktiknya adalah pertama pada saat perolehan aktiva

Pajak Masukan dikreditkan terlebih dahulu seluruhnya apabila berdasarkan perkiraan bahwa aktiva yang dibeli akan dipergunakan sepenuhnya untuk memproduksi BKP/JKP yang transaksinya terutang PPN, atau pajak masukan dikreditkan terlebih dahulu pada masa terjadinya perolehan aktiva sebesar perkiraan presentase posrsi BKP/JKP yang transaksinya terutang PPN.

Selanjutnya setelah akhir tahun, wajib pajak akan menghitung kembali penggunaan sebenarnya dari aktiva tersebut, sehingga diketahui berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang terutang PPN dan berapa persen penggunaan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Apa perbandingan yang sebenarnya telah didapat, maka wajib pajak wajib melakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan ketika memperoleh aktiva dahulu., dengan cara menghitung koreksi berdasarkan presentase sebenarnya dalam satu tahun tersebut hasilnya dikalkulasikan dengan Pajak Masukan yang telah dikreditkan, dilanjutkan dengan melakukan koreksi apabila berdasarkan perhitungan Pajak Masukan atas Aktiva tersebut terlalu besar atau terlalu kecil dikreditkan. Jika terlampau kecil, selisih pajak masukan ditambahkan kesalah satu masa pajak dimasa Januari, Februari atau Maret tahun berikutnya, demikian pula bila terjadi sebaliknya selisih pajak masukan diikurangkan dari salah satu masa pajak dibulan tersebut. Apabila masa manfaat aktiva lebih dari satu tahun proses koreksi dilakukan secara bertahap selama masa manfaat aktiva lebih dari satu tahun proses koreksi dilakukan secara bertahap selama masa manfaat aktiva yaitu empat tahun untuk BKP selain tanah dan bangunan.

Pada saat memperoleh BKP/JKP Pengusaha Kena Pajak memperkirakan jumlah transaksi yang akan terutang PPN dan tidak terutang, rumus perhitungan pengkreditan pajak masukan pada saat memperoleh BKP/JKP adalah :

$$P = PM \times Z$$

Dengan ketentuan:

P adalah Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z adalah presentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya (penyerahan terutang/seluruh penyerahan dalam setahun).

$$P = \frac{PM}{T} \times Z$$

Dengan ketentuan :

P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku,

PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,

Z adalah presentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku,

T adalah masa manfaat Barang Kena Pajak yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk barang kena pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 tahun .
- b. Untuk barang kena pajak selain tanah, bangunan, dan jasa kena pajak adalah 4 tahun .

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak PT.Telkomunikasi Indonesia, Tbk yang bergerak dibidang Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES). Pada bulan januari membeli mobil untuk melakukan jasa pemasangan Indihome dengan harga perolehan sebesar Rp.200.000.000 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.20.000.000. Berdasarkan data yang dimiliki,diperkirakam presentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya adalah sebesar 70%. Berdasarkan data tersebut maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN Masa Pajak Januari 2017 sebesar :

$$Rp. 20.000.000 \times 70\% = Rp. 14.000.000$$

3.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusah
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (www.online-pajak.com).

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak .

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang berwujud diserahkan merupakan barang kena pajak
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

3.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha kena pajak

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat 1 huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk

kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat huruf a dan huruf c UU PPN 1984 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP.

Berbeda halnya dengan ekspor BKP. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f, ekspor BKP dapat dikenai PPN hanya apabila yang melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Dalam hal eksportir belum dikukuhkan menjadi PKP, atas ekspor BKP ini tidak dikenai PPN. Pemahaman yang sama berlaku terhadap Pasal 4 ayat 1 huruf g dan huruf h.

2. Pengusaha Tidak Kena Pajak

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984. pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP, bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.

3.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah. (www.online-pajak.com)

3.1.7 Contoh Perhitungan PPN Pajak Masukan

Pada tanggal 14 Februari 2017 PT. Telekomunikasi Indonesia membeli barang kepada Kop Serba Usaha melakukan pembelian material dan jasa instalasi dual source STO Wonosari dan Wates Yogyakarta sebagai berikut :

Harga Beli Material dan Jasa	19.000.000
PPN X 10%	1.900.000 +
Harga Beli Komputer dan PPN	20.900.000

Maka PPN sebesar 1.900.000 merupakan Pajak Masukan bagi PT.Telekomunikasi Indonesia. Dalam contoh tersebut PPN pajak masukan masuk dalam bagian Wajib Pungut dikarenakan total PPN melebihi 1.000.000 . Pada penjurnalan akuntansi pun dicatat sebagai jurnal umum dengan contoh :

Daftar Tabel 3.1 – Jurnal Umum Wajib Pungut

Jurnal Umum		
Pembelian dan Jasa Konstruksi	19.000.000	
PPN	1.900.000	
Hutang Dagang/Kas		20.900.000

Pada tanggal 14 Februari 2017 PT. Telekomunikasi Indonesia membeli barang kepada CV.Tirta Investama melakukan pembelian material dan jasa perbaikan diesel genset network area yogyakarta sebagai berikut :

Harga Beli Material dan Jasa 7.847.000

PPN X 10% 784.700 +

Harga Beli Komputer dan PPN 8.631.700

Maka PPN sebesar 784.000 merupakan Pajak Masukan bagi PT.Telekomunikasi Indonesia. Dalam contoh tersebut PPN pajak masukan masuk dalam bagian Wajib Pungut dikarenakan total PPN melebihi 1.000.000 . Pada penjurnalan akuntansi pun dicatat sebagai jurnal umum dengan contoh :

Daftar Tabel 3.2 – Jurnal Umum Non Wajib Pungut

Jurnal Umum		
Pembelian dan Jasa Konstruksi	7.847.000	
PPN	784.700	
Hutang Dagang/Kas		8.631.700

3.1.8 Contoh Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam suatu masa dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya .

Contoh:

Masa Pajak Januari 2017

Pajak Keluaran	= Rp.2.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp.4.500.000 (-)
Pajak yang lebih bayar	= Rp.2.500.000

Pajak yang lebih bayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Februari

Masa Pajak Februari 2017

Pajak Keluaran	= Rp.3.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp.2.000.000 (-)
Pajak yang kurang bayar	= Rp.1.000.000

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak

Januari yang dikompensasikan ke Masa

Pajak Februari 2017	= Rp.2.500.000 (-)
Pajak lebih dibayar masa Februari 2017	= Rp.1.500.000

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Maret 2017.

Sesuai dengan self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan

Contoh :

Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan :

Pajak Keluaran = Rp.10.000.000

Pajak Masukan = Rp. 8.000.000

Dari hasil pemeriksaan diketahui :

Pajak Keluaran = Rp.15.000.000

Pajak Masukan = Rp.11.000.000

Dalam hal ini,Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp.11.000.000 , tetapi tetap sebesar Rp.8.000.000 sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian,perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran = Rp.15.000.000

Pajak Masukan = Rp. 8.000.000 (-)

Kurang Bayar menurut

Hasil pemeriksaan = Rp. 7.000.000

Kurang Bayar menurut

Surat pemberitahuan = Rp. 2.000.000 (-)

Masih kurang bayar = Rp. 5.000.000

3.1.9 Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. (www.online-pajak.com)

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

3.1.10 Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Salah Dalam Pengisian Atau Salah Dalam Penulisan

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau penerima Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
2. Pembetulan Faktur Pajak tidak diperkenankan dengan cara menghapus, mencoret ,atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.
3. Penerbitan dan Peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan faktur pajak yang biasa sesuai dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak .
4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada nomor 1, berisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
5. Pada Faktur Pajak Pengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomer Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusahaan Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh sebagai berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual,

Faktur Pajak yang diganti	:
Kode dan Nomor Seri	:
Tanggal	:

6. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
7. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :
 - a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian.
 - b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP,PPN, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.1.11 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN Pajak Masukan

Dalam tata cara pembayaran yang wajib membayar/menyetor dan melapor PPN/PPnBM :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM,adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Direktorat jendral Bea dan Cukai
 - d. Pertamina
 - e. BUMN/ BUMD
 - f. Kontraktor bagi hasil dan Kontrak Karya bidang Migas dan Pertambangan Umum lainnya
 - g. Bank Pemerintah
 - h. Bank Pembangun Daerah
 - i. Perusahaan Operator Telepon Selular

Yang Wajib Disetor PPN/PPnBM :

1. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran,bila Pajak Masukan lebih kecil dari pajak keluaran

2. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikaan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah
3. PPN/PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Tata cara pada saat Pembayaran/Penyetoran PPN Pajak Masukan :

1. PPN Pajak Masukan yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.
Contoh : Masa Pajak Januari 2017 penyetoran paling lambat tanggal 15 Februari 2017
2. PPN Pajak Masukan yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT, dan STP harus dibayar / disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT,dan STP tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk,dan apabila pembayaran Bea masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor
4. PPN/PPnBM yang pemungutnya dilakukan oleh :
 - a. Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
 - b. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
5. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Catatan :

Apabila tanggal jatuh tempo pada hari libur,maka pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Sarana pembayaran/penyetoran PPN Pajak Masukan :

1. Untuk membayar atau menyetor PPN Pajak Masukan digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan atau Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh : Bank penerima pembayaran, Kantor Pos, dan Giro atau Kantor Jendral Bea dan Cukai penerima setoran.

3.1.12 Pengertian E-Faktur Online Pajak

Aplikasi eFaktur pajak.go.id adalah sebuah *software* yang disediakan oleh DJP untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN 1111 dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Persetujuan (*approval*) di sini maksudnya DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa QR code pada lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *approval*.

Saat mengunggah informasi e-faktur pajak harus berformat CSV, bisa saja sistem DJP menolak (*reject*) faktur pajak Anda. Alasannya bisa jadi karena ada kesalahan informasi dalam faktur pajak. Status *reject* ini akan disertai dengan keterangan tentang kekeliruannya. Untuk itu, wajib pajak perlu memperbaiki informasi sesuai keterangan dan mengunggah data kembali.

Setelah memperoleh persetujuan, barulah faktur pajak dapat disampaikan ke lawan transaksi. Kegunaan aplikasi efaktur ini, di sisi lawan transaksi, faktur pajak masukan lebih terjamin validitas datanya, sehingga relatif lebih aman ketika dikreditkan.

Sebelum ada aplikasi dari DJP ini, PKP harus menerbitkan faktur pajak secara manual terlebih dahulu, kemudian membuat SPT Masa PPN di aplikasi e-SPT PPN 1111. Setelah adanya aplikasi eFaktur DJP, kedua proses tersebut disatukan dalam satu aplikasi.

3.1.13 Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Tabel sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian dibawah ini.

Sanksi **denda**:

Daftar Tabel 3.3 Sanksi Denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	Rp100.000 atau Rp500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 (4)	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur	2%	Dari DPP

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
		pajak, tetapi tidak tepat waktu;		
		pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

Sanksi **bunga**:

Daftar Tabel 3.4 Sanksi Bunga

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

Sanksi **kenaikan**:

Daftar Tabel 3.5 Sanksi Kenaikan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 System Application and Product in data Processing

Sistem aplikasi ini merupakan system aplikasi yang mengkoordinir kegiatan operasional di semua bagian PT. Telekomunikasi Indonesia . SAP (System Application and Product in data processing) adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu PT. Telekomunikasi Indonesia merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan lainnya. Modul tersebut terdiri dari :

1. SD-Sales & Distribution: membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order (proses sales, shipping dan billing)
2. MM-Materials Management: membantu menjalankan proses pembelian (procurement) dan pengelolaan inventory
3. PP-Production Planning: membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi (manufacturing) suatu perusahaan.
4. QM-Quality Management: membantu men-cek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistic
2. PM-Plant Maintenance: suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis
3. HR-Human Resources Management: mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, management waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai

4. FI-Financial Accounting: Mencakup standard accounting cash management (treasury), general ledger dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting.
5. CO-Controlling: Mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas
6. AM-Asset Management: Membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses asset accounting tradisional dan technical assets management, sampai ke investment controlling

3.2.1 Prosedur Penyelesaian PPN Pajak Masukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Dalam proses penyelesaian pajak, terdapat dua kegiatan pokok yaitu penyetoran pajak masukan dan pelaporan pajak masukan. Dalam kegiatan ini PT. Telkom melakukan penyetoran atas pajak yang terutang melalui web yang bernama BNI Tax yang berada pada alamat web bnidirect.bni.co.id. Sedangkan untuk pelaporan, PT. Telkom melaporkan pajak yang terutang melalui aplikasi dari dirjen pajak yaitu E-Faktur. Selain itu, untuk memudahkan kegiatan penyetoran dan pelaporan pajak, PT. Telkom menggunakan dua sistem aplikasi dalam pengerjaannya yaitu SAP (System Application and Product) dan FINEST (Financial Enhanced Supporting Tools). SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan lainnya. Sedangkan FINEST adalah suatu aplikasi keuangan yang digunakan PT. Telkom Indonesia untuk membantu atau mempermudah pekerjaan di bagian keuangan.

Dalam prosedur penyelesaian pajak masukan, bagian *Tax Operation* melakukan proses penanganan faktur pajak dengan membaca dan menulis data yang ada di faktur pajak secara manual dan menyalin data tersebut ke aplikasi finest (input finest), setelah data di input maka didownload laporan dari finest dan di cek secara manual untuk menemukan kesalahan input data, setelah itu apabila seluruh data yang diinput sudah sesuai dengan bukti fisik maka selanjutnya akan dibuat data upload untuk keperluan pembayaran.

Berikut adalah tahapan penyelesaian pajak masukan setelah menerima faktur pajak:

1. Download data pajak masukan dari System Application Product (SAP).
2. Rekonsiliasi data dari SAP ke Finest.
3. Download data hasil rekonsiliasi dari Finest.
4. Cek hasil rekonsiliasi tersebut dengan faktur pajak fisik.
5. Membuat bahan upload ke E-Faktur, lalu melakukan upload.
6. Membuat bahan upload ke BNI Tax, lalu melakukan upload.
7. Download SSP (Surat Setor Pajak) dari BNI Tax.
8. Membuat Transaksi Antar Kantor (TAK).

Awal terjadinya transaksi PPN pajak masukan pada PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk :

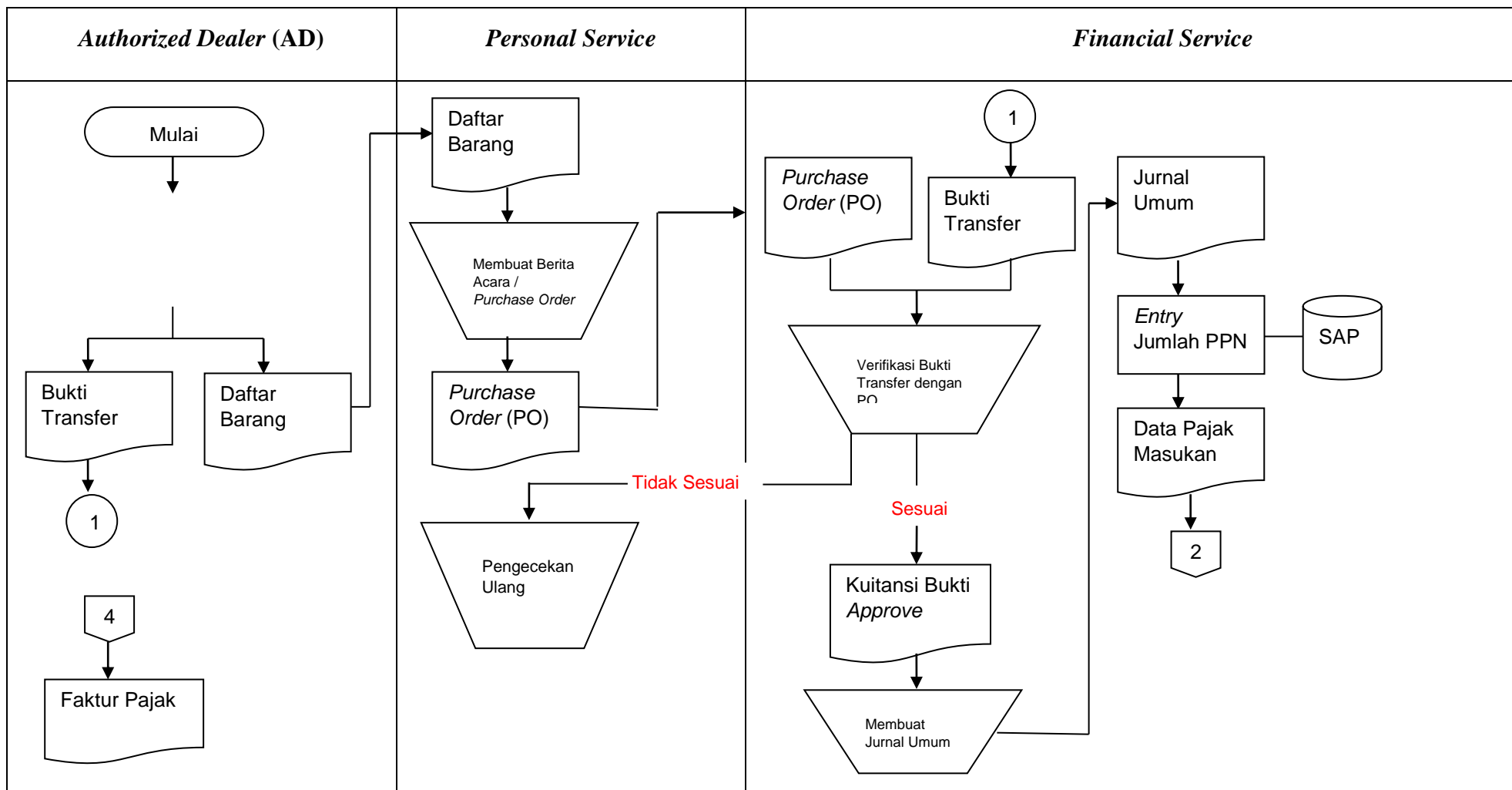
1. Pada awalnya PT.Telkomunikasi Indonesia,Tbk memberi anggaran pada bidang-bidang lain di perusahaan .
2. Bidang tersebut melakukan kegiatan dengan pengadaan pembelian barang baju untuk souvenir
3. Pada bagian bidang tersebut harus sudah ditunjuk orang yang akan membuat berita acara untuk pengadaan pembelian barang.
4. Berita acara tersebut harus sudah sesuai kesepakatan dengan penjual dan pembeli
5. Setelah pengiriman berita acara penjual menyanggupi barang akan dikirim tanggal berapa dan harus tepat sesuai tanggal.

6. Bila barang tersebut sudah dikirim penerima atau dalam bidang tersebut membuat berita acara atas pembelian barang tersebut yang ditanda tangani oleh manager dibidang tertentu,
7. Berita acara telah dibuat akan dikirim ke petugas posting dibidang tersebut melalui SAP
8. Setelah petugas posting melakukan posting ke SAP akan masuk pada petugas TAX Operation
9. Selanjutnya diproses oleh petugas TAX Operation dan Faktur Pajak akan dikirim oleh Penjual ke PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional IV Jateng dan DIY

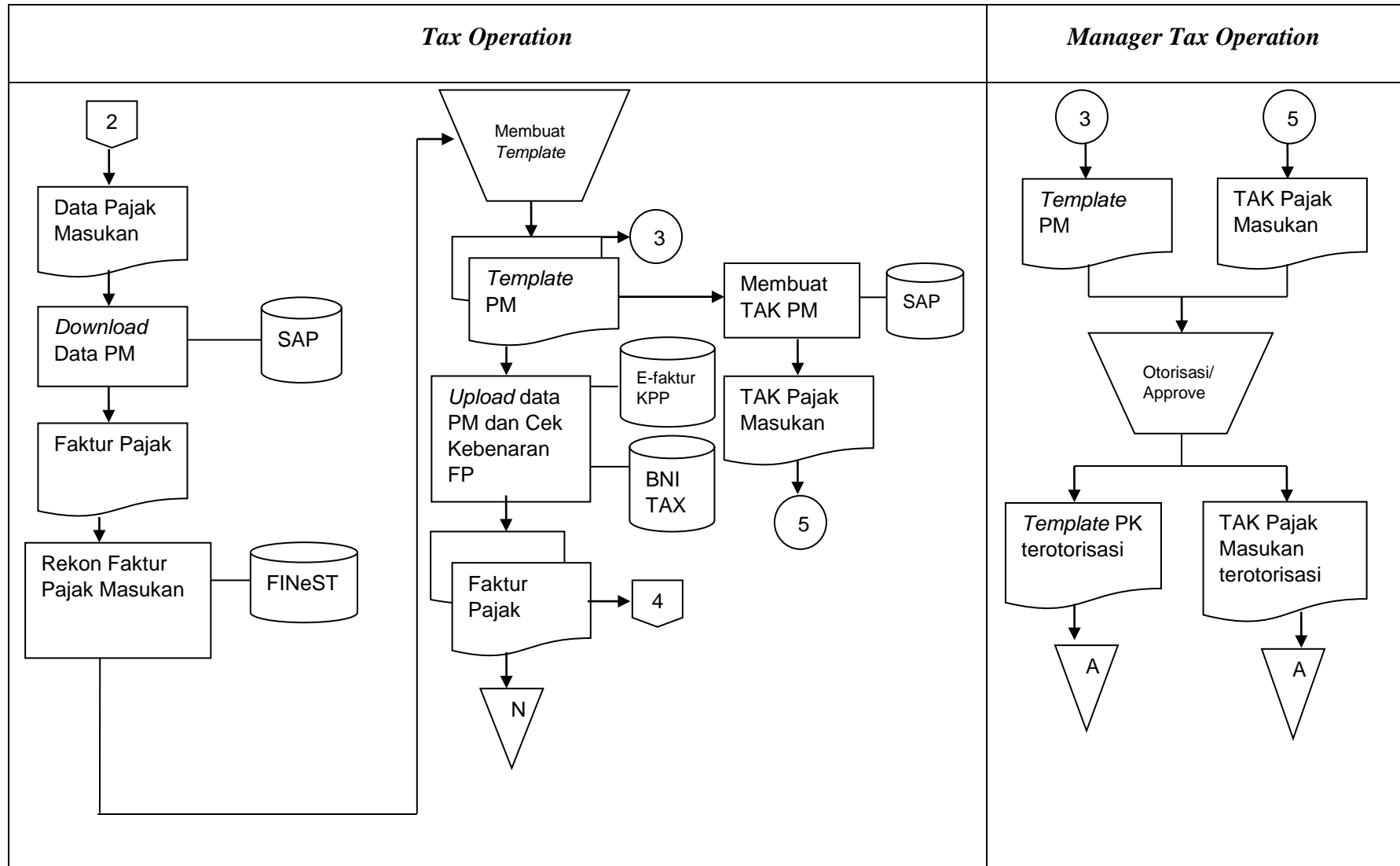
Penyelesaian faktur pajak di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat digambarkan dengan flow chart sebagai berikut :

Gambar 3.1- Bagan Transaksi Pajak Masukan

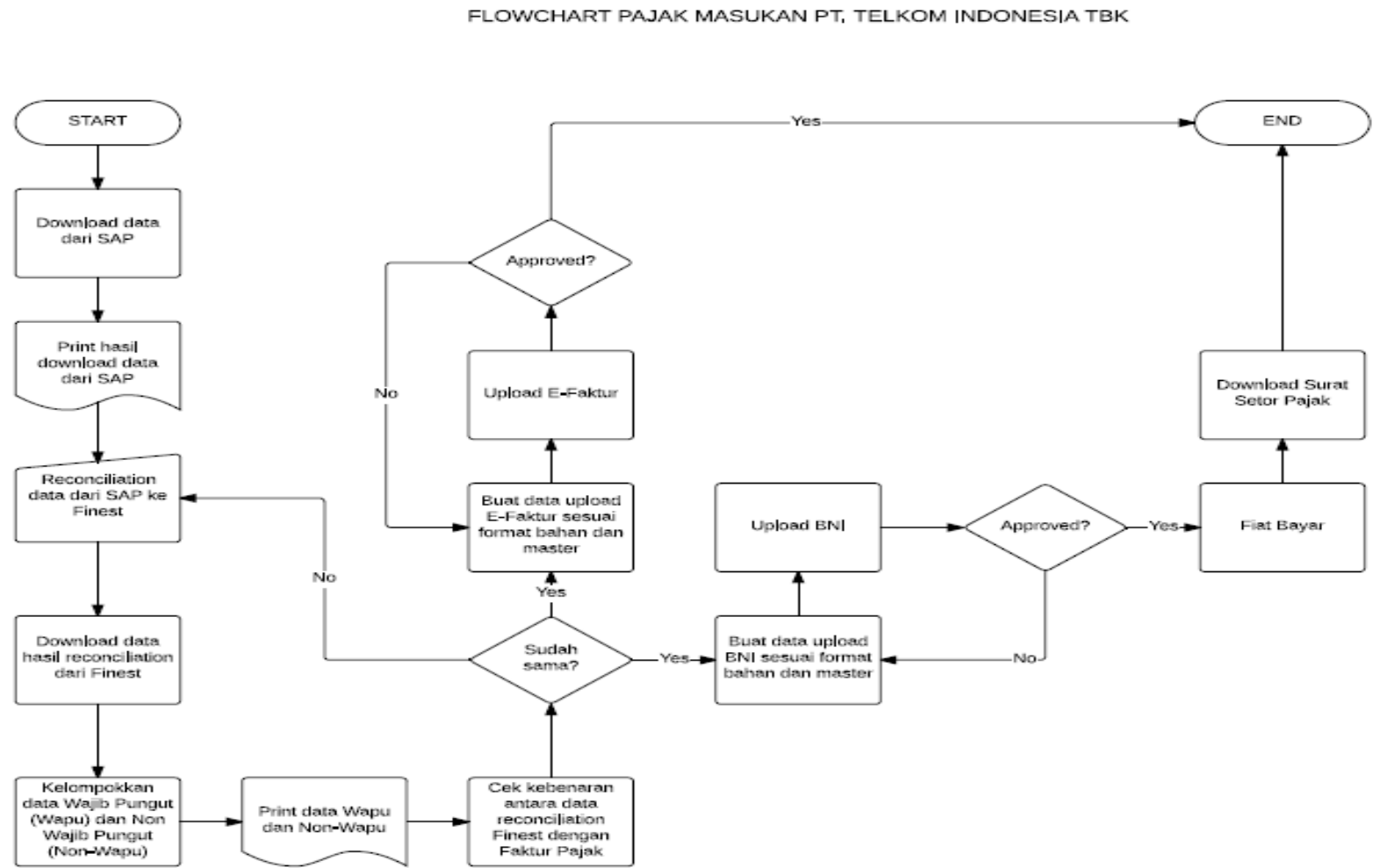
Keterangan :	
PO	: <i>Purchase Order</i>
FINeST	: <i>Financial Enhanced Supporting Tools</i>
SAP	: <i>System Application and Product</i>
PM	: Pajak Masukan
TAK	: Transaksi Antar Kantor
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak



Gambar 3.2. – Flow Chart Akhir Pajak Masukan



Gambar 3.3. – Flow Chart Penyelesaian Pajak Masukan



3.2.3 Langkah-langkah penyelesaian Pajak Masukan Pada PT.

Telekomunikasi Indonesia

Berikut ini adalah deskripsi langkah-langkah Pajak Masukan secara detail:

1. Download data pajak masukan dari System Application Product (SAP).

SAP adalah sebuah software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari sehingga dapat membantu menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara terintegrasi. Data mengenai transaksi ini diatur dalam bentuk excel kemudian diprint untuk memudahkan melakukan entry (rekonsiliasi) data.

2. Rekonsiliasi data dari SAP ke Financial Enhanced Supporting Tools (Finest) berdasarkan BUS Area.
3. Download data hasil rekonsiliasi dari Finest, lalu kelompokkan antara wapu dan non-wapu, lalu print. Data yang kita download dari SAP lalu kita rekon ke Finest biasanya campuran antara wapu dan non wapu. Data ini harus kita pisahkan agar memudahkan dalam proses pembayaran, karena prosedurnya berbeda.
4. Verifikasi hasil rekonsiliasi tersebut dengan faktur pajak fisik. Hasil rekonsiliasi di Finest harus dicocokkan dengan faktur fisik. Dalam proses ini biasanya dilakukan manual dan berulang-ulang untuk menghindari kesalahan. Sebisa mungkin zero mistake. Untuk mempermudah, saat ini sedang dibuatkan otomatisasi pembacaan barcode pada faktur pajak.
5. Membuat bahan upload ke E-Faktur, lalu melakukan upload.

Data hasil rekonsiliasi yang telah melalui proses pengecekan diupload ke sistem E-Faktur untuk kemudian dicek kebenaran data nya, biasanya masalah yang muncul pada proses ini adalah nomor seri faktur pajak pengganti. Jika ditemukan masalah oleh Sistem, maka data yang telah kita upload akan secara otomatis di- reject. Langkah upload E-Faktur akan dijelaskan lebih detail dibawah.

6. Membuat bahan upload ke BNI, lalu melakukan upload.

Data hasil rekonsiliasi yang telah melalui proses pengecekan diupload ke System BNI Corporate Banking sebelum melakukan proses pembayaran. Dalam melakukan upload data, tidak boleh ada kesalahan format karena bisa mengalami reject dari System BNI. Jika data upload BNI sudah approved, lakukan fiat bayar. Langkah upload BNI akan dijelaskan lebih detail dibawah.

7. Download SSP (Surat Setor Pajak) dari BNI.

Setelah melakukan melakukan fiat bayar, kita sebagai penyetor pajak akan mendapat file SSP yang menandakan bahwa transaksi yang kita lakukan telah membayarkan pajaknya kepada Direktorat Jendral Pajak. SSP ini secara otomatis dikirim ke beneficiary email masing-masing vendor.

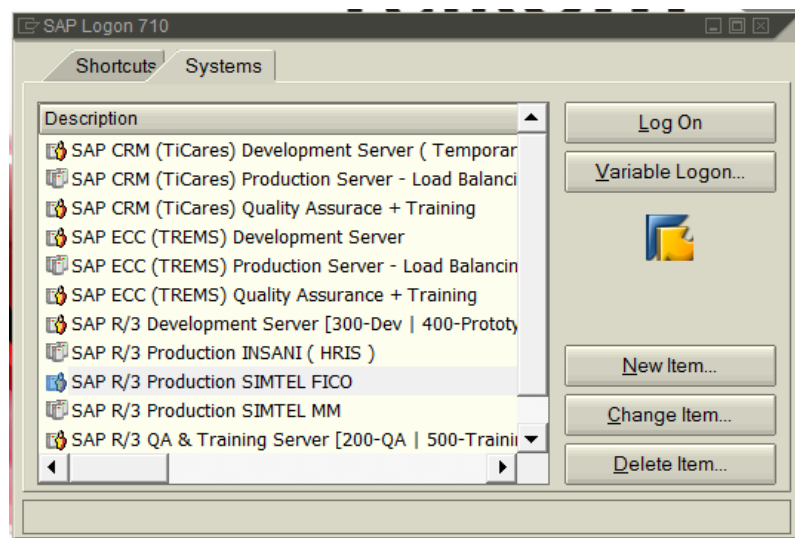
8. Membuat Transaksi Antar Kantor (TAK).

TAK merupakan rekap yang menunjukkan bahwa data transaksi yang ada di SAP dan Finest menunjukkan angka yang balance atau seimbang. Dalam TAK, dimuat juga angka-angka yang mengalami masalah (double entry, salah entry, dll) beserta waktu koreksinya sehingga didapat angka yang seimbang antara SAP dan Finest.

1) Detail Langkah Download Pajak Masukan dari Aplikasi SAP

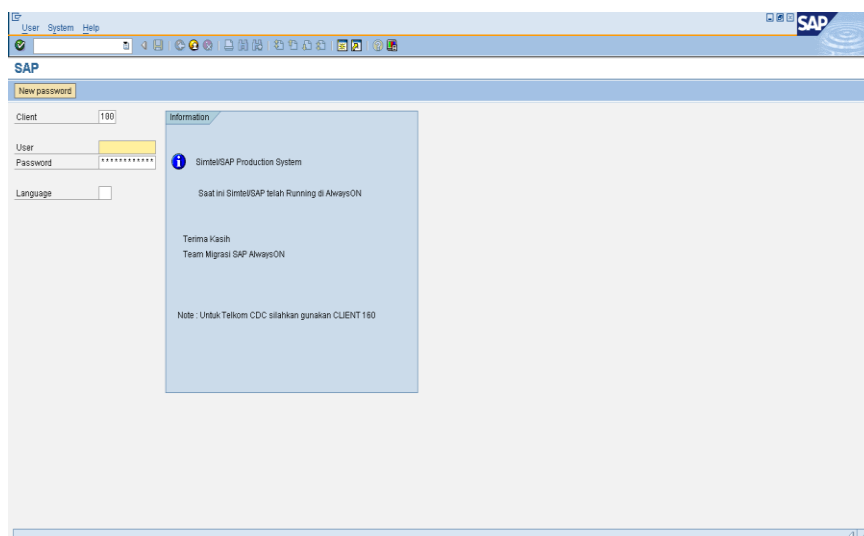
1. Buka SAP (System Application Production), pilih SAP R/3 Production SIMTEL FICO, Log On.

Gambar 3.4. – Tampilan Awal Aplikasi SAP



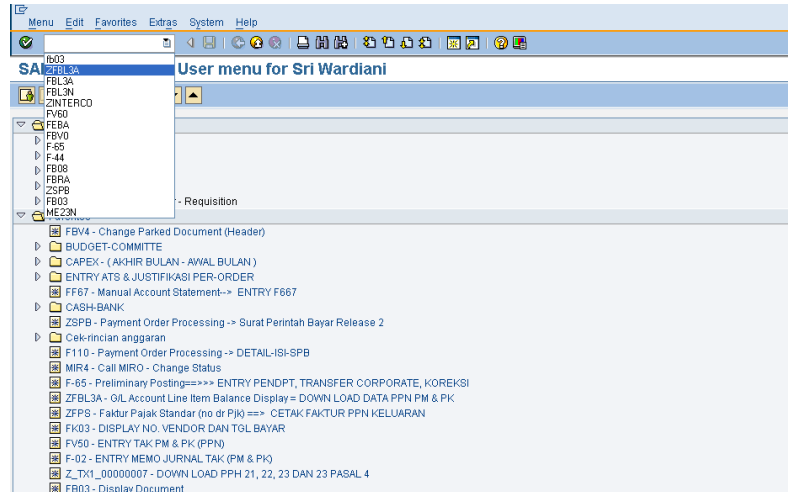
2. Isi kolom username / NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan password

Gambar 3.5. – Login Aplikasi SAP



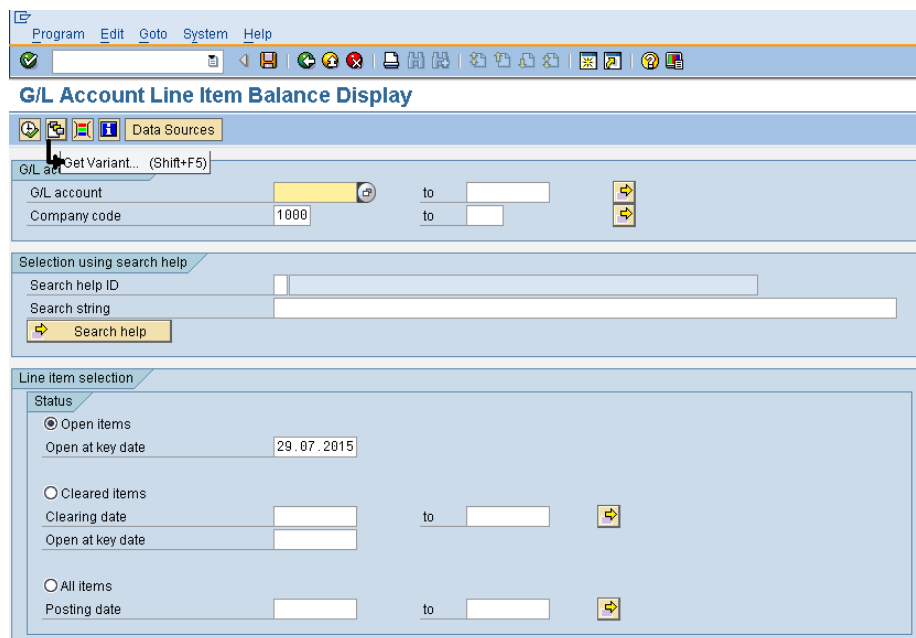
3. Pilih T-Code ZFBL3A, lalu enter.

Gambar 3.6. – Tampilan SAP Menu



4. Klik Get Variant.

Gambar 3.7. – Tampilan Account Line Item Balance Display



8. Akan muncul NIK pengguna, lalu klik icon Execute.

Gambar 3.8. – Memunculkan NIK Pengguna

The screenshot shows the SAP 'G/L Account Line Item Balance Display' window. The 'G/L account selection' section has 'G/L account' and 'Company code' (1000) fields. The 'Selection using search help' section has 'Search help ID' and 'Search string' fields. A 'Find Variant' dialog box is open, showing a list of variants. The 'Execute (F8)' button is highlighted with a red box and a black arrow.

Status	Variant	Environment	Created by	Changed by	Original language
Open	640723				

9. Akan muncul daftar bantuan yang dikehendaki, pilih “Download PM”

Gambar 3.9. – Tampilan Daftar Bantuan

The screenshot shows the same SAP 'G/L Account Line Item Balance Display' window. The 'ABAP: Variant Directory of Program ZFTIC01' dialog box is open, displaying a table of variants. The 'DOWN-LOAD-PM' variant is highlighted in yellow.

Variant name	Short description	E	P	Change
DOWN-LOAD KJP	KJPE - 20501014	A		640723
DOWN-LOAD-PM	DOWN-LOAD-PM-ANNIE	A		640723
FBL3N	MENCARI NOMINAL PPN	A		640723
KJPE-20501014	KJPE-20501014	A		640723
PM-20501014	PM-20501014	A		
PPN-KELUARAN	20501008-ANNIE	A		640723

10. Ubah kolom posting date (sesuai masa, diisi tanggal awal bulan hingga tanggal saat ini) dan opendate (tanggal kita membuka SAP / tanggal saat ini).

Gambar 3.10. – Tampilan PM Download

The screenshot shows the SAP 'G/L Account Line Item Balance Display' window. It has a menu bar (Program, Edit, Goto, System, Help) and a toolbar. The main area is divided into sections: 'G/L account selection' with fields for 'G/L account' (11802011) and 'Company code' (1000); 'Selection using search help' with 'Search help ID' and 'Search string' fields; and 'Line item selection' with radio buttons for 'Open items', 'Cleared items', and 'All items' (selected), and 'Posting date' (01.07.2015 to 28.07.2015).

11. Klik save dua kali, Klik execute, lalu akan muncul data Pajak Masukan (PM) seluruh Indonesia.
12. Klik kolom username, lalu klik set filter. Masukkan NIK petugas posting area Jateng & DIY.
13. Copy NIK petugas posting area Jateng & DIY yang diambil dari Excel kolom SAP per kotak

Gambar 3.11. – Menyalin NIK Petugas Posting

The screenshot shows the same SAP window as Gambar 3.10, but with a 'Multiple Selection for User Name' dialog box open. The dialog box has tabs for 'Select Single Values (8)', 'Select Ranges', 'Exclude Single Values', and 'Exclude Ranges'. It displays a list of user names and their corresponding NIKs. The main table in the background shows account data with columns for Account, Assignment, BaseLine, and User Name.

Account	Assignment	BaseLine	User Name
Witel1 JakBar	00 00 0000	880125	
JAKUTR TELES	00 00 0000	810031	
PT BNS 1906	00 00 0000	870071	
Banten414 GoToSen	00 00 0000	790066	
Banten Timur	00 00 0000	890103	
06 / BJH	00 00 0000	822731	
WITEL BEKASI	00 00 0000	822081	
005/IDC/2015	00 00 0000	870071	
PT. SDO AGUNG	00 00 0000	870071	
06 / BJH	00 00 0000	822731	
VOUCHER SKJ	00 00 0000	851137	
201500000496	00 00 0000	591321	
PKS-1531/LG05/2012	00 00 0000	820811	
201500000493	00 00 0000	890578	
201500000556	00 00 0000	851404	
201500000383	00 00 0000	710328	
201500000443	00 00 0000	890578	
201500000383	00 00 0000	710328	
201500000506	00 00 0000	851404	
201500000425	00 00 0000	591321	
201500000546	00 00 0000	591321	
201500000399	00 00 0000	591321	
201500000370	00 00 0000	811032	
201500000380	00 00 0000	811032	
201500000390	00 00 0000	811032	
201500000407	00 00 0000	710328	
201500000475	00 00 0000	890578	
201500000478	00 00 0000	890578	

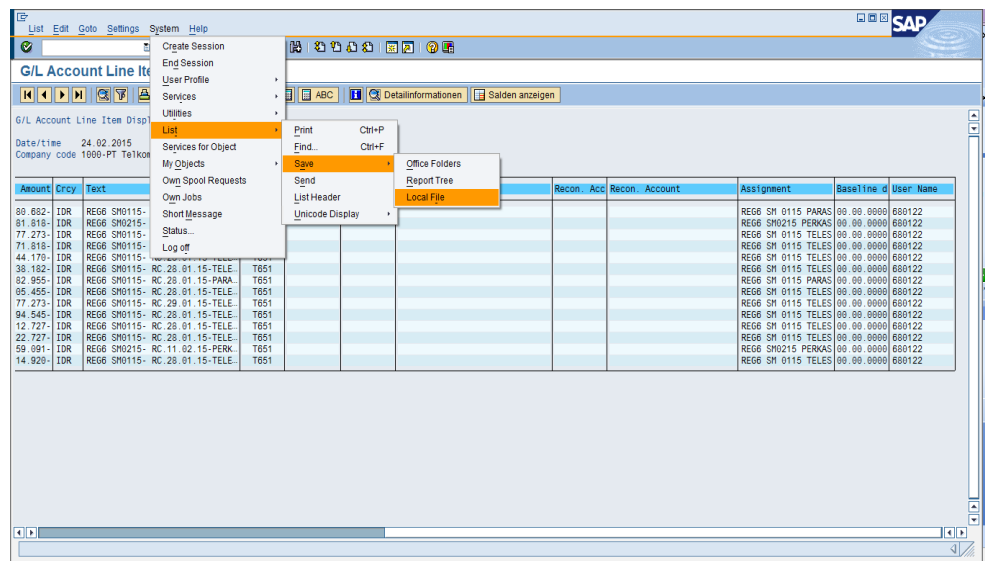
14. Klik executelalu muncul data yang dikehendaki.

15. Simpan data tersebut.

Setelah download selesai, lalu simpan data tersebut di SAP. Berikut langkah-langkahnya:

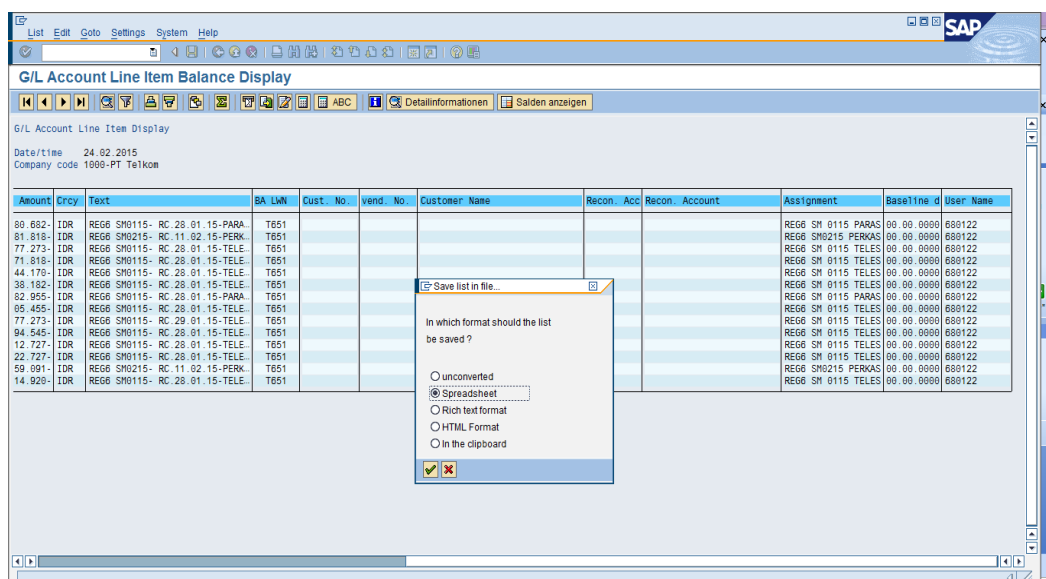
1. Klik menu system → List → Save → pilih Local File

Gambar 3.12. – Tampilan Menu System



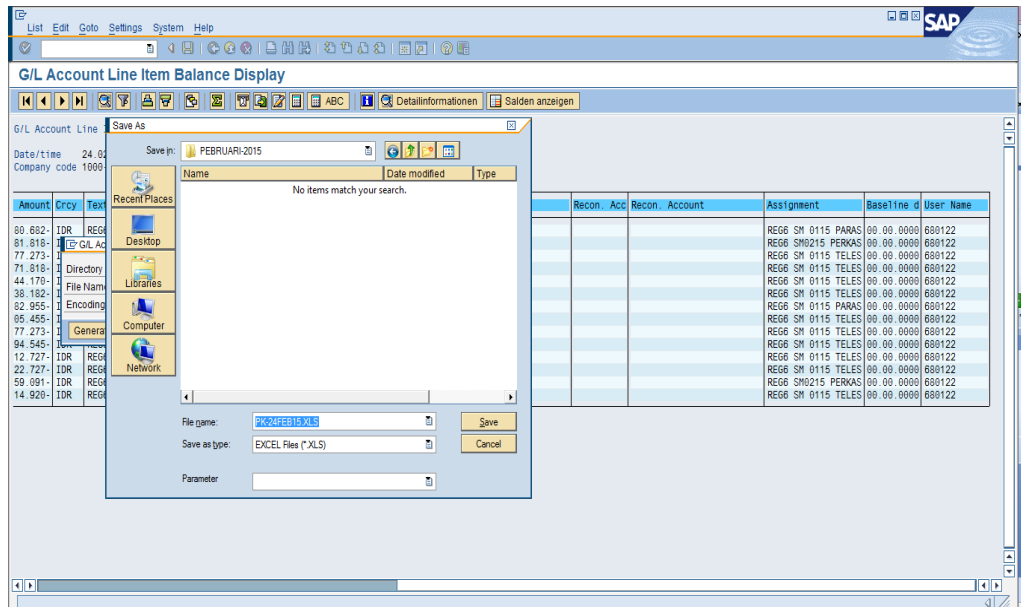
2. Pada “Save list in file”, pilih Spreadsheet. Lalu klik Enter (Gambar Gentang)

Gambar 3.13. – Tampilan Spreadsheet



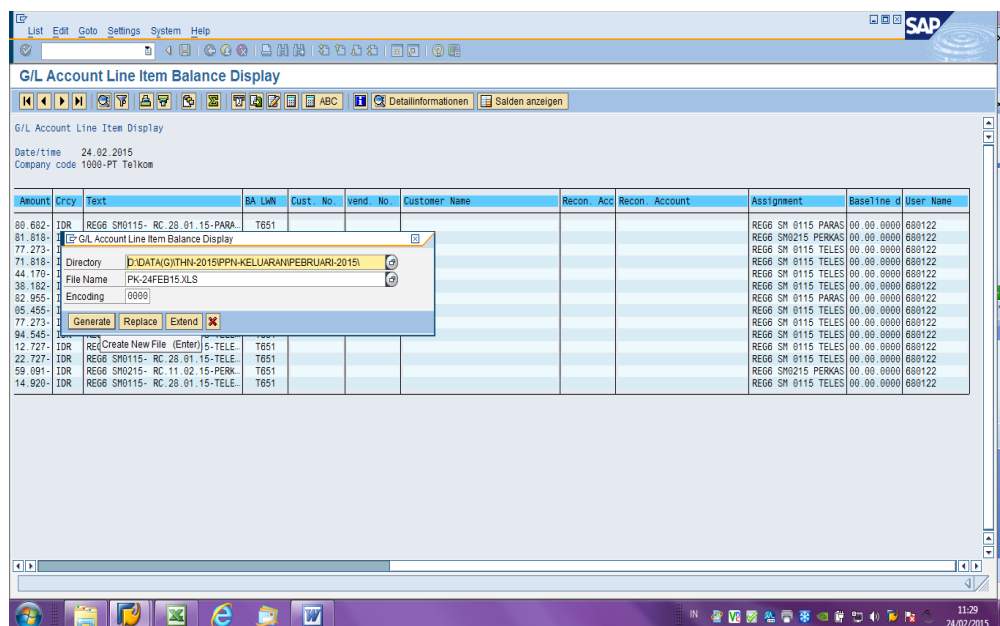
4. Untuk menyimpan data, klik file name.

Gambar 3.14 – Menyimpan Data



5. Masukkan nama file dan tempat dimana data akan disimpan. Lalu klik save.
6. Bila sudah, klik Generate

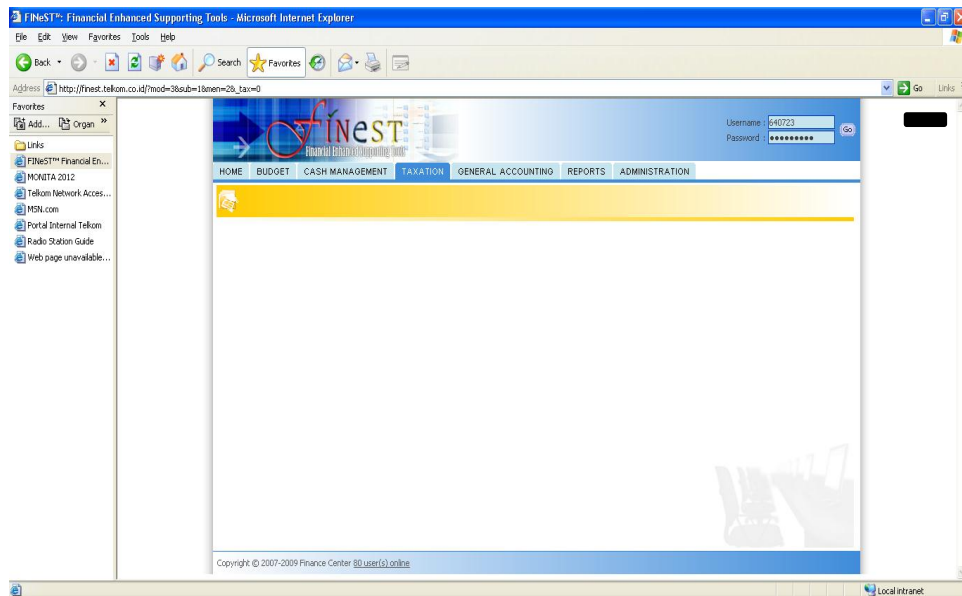
Gambar 3.15. – Menggenerate data



2) Rekonsiliasi antara SAP dengan FINEST

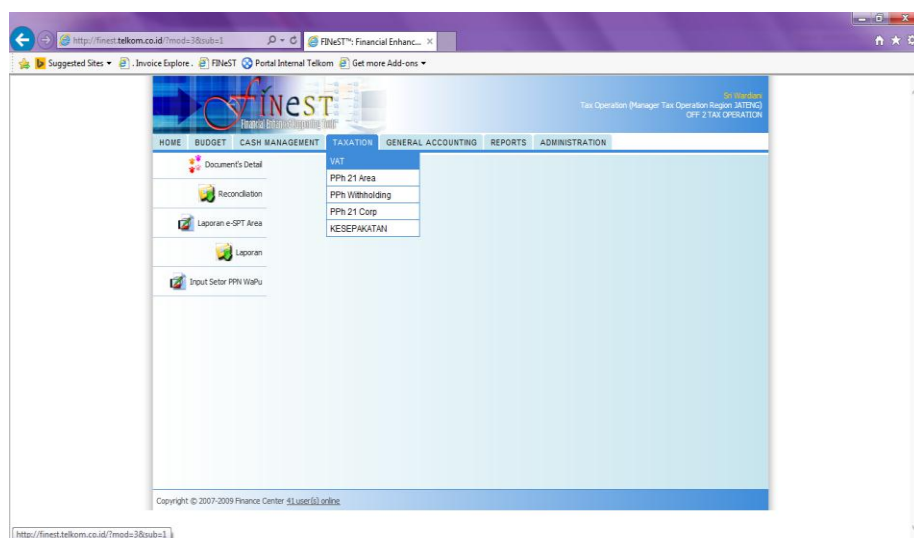
1. Buka aplikasi FINEST
2. Masukkan username dan password

Gambar 3.16. – Tampilan Awal Finest



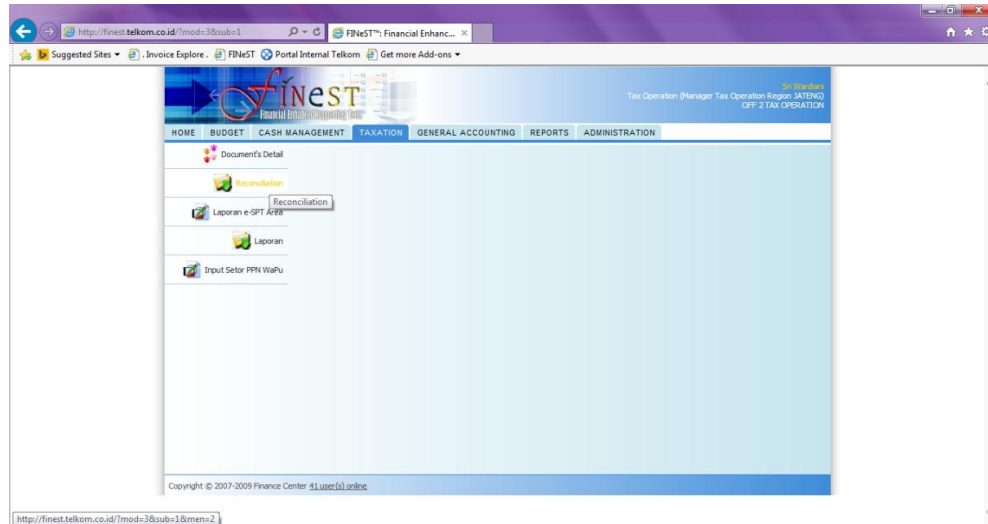
3. Pilih Taxation → Klik VAT

Gambar 3.17. – Tampilan Taxation Finest



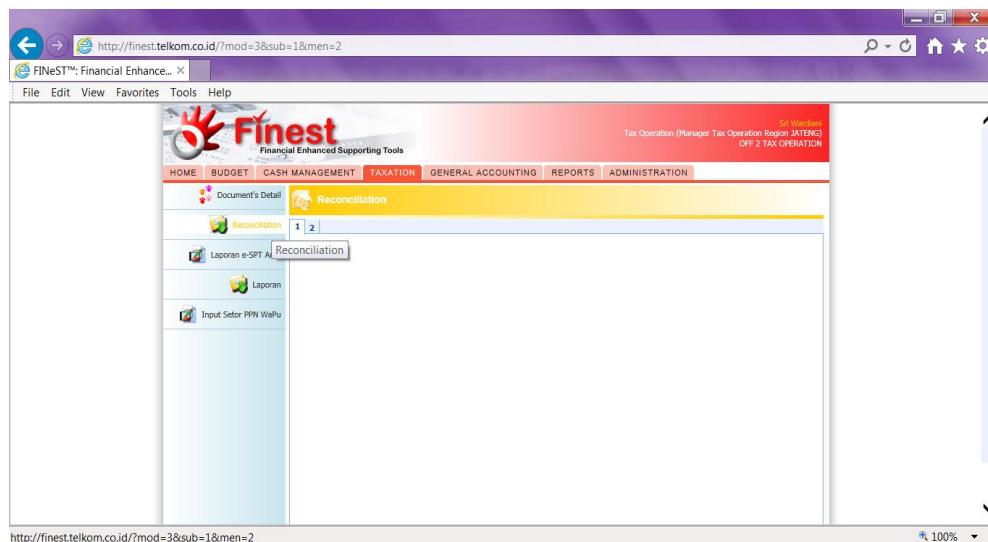
4. Klik Reconciliation, untuk memulai mengentry Pajak Masukan.

Gambar 3.18. – Tampilan Pilhan VAT



5. Pilih nomor 1 untuk Rekonsiliasi PM (Pajak Masukan)

Gambar 3.19. – Daftar Rekonsiliasi PPN



- Masukkan BA Area dan Periode yang dikehendaki, untuk DOC Type pilih FP. Lalu klik Execute.

Gambar 3.20. – Pengisian Bus Area dan Priode

- Klik Ctrl-F → masukkan nomor dokumen. Untuk menemukan dokumen yang akan dientry. Lalu klik manual input (tanda centang).

Gambar 3.21. – Tampilan Data-data Transaksi

Document Number	Date	Amount	Status
PP-7651 20150212 5500000346	20150212	-1,181,818	Manual
PP-7651 20150212 5500000335	20150212	-886,364	Manual
PP-7651 20150213 5500000336	20150213	-5,909,091	Manual
PP-7651 20150216 5500000336	20150216	-177,273	Manual
PP-7651 20150216 5500000330	20150216	-945,455	Manual
PP-7651 20150216 5500000311	20150216	-502,272	Manual
PP-7651 20150216 5500000312	20150216	-147,727	Manual
PP-7651 20150216 5500000313	20150216	-265,909	Manual
PP-7651 20150216 5500000314	20150216	-590,909	Manual
PP-7651 20150217 5500000319	20150217	-354,545	Manual
PP-7651 20150217 5500000364	20150217	-590,909	Manual
PP-7651 20150218 5500000363	20150218	-7,237,159	Manual
PP-7651 20150218 5500000346	20150218	-280,682	Manual
PP-7651 20150218 5500000347	20150218	-1,181,818	Manual
PP-7651 20150218 5500000352	20150218	-777,273	Manual
PP-7651 20150218 5500000353	20150218	-1,571,818	Manual
PP-7651 20150218 5500000354	20150218	-944,170	Manual
PP-7651 20150218 5500000357	20150218	-138,182	Manual
PP-7651 20150218 5500000358	20150218	-582,955	Manual
PP-7651 20150218 5500000359	20150218	-1,105,455	Manual

8. Masukkan NPWP Lawan Transaksi dengan cara klik pada tanda panah hijau, untuk mencari NPWP vendor.

Gambar 3.22. – Tampilan Pengisian Data Finest

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://finest.telkom.co.id/mod=3>. The main content is a form titled "Entry Espt" with the following fields and values:

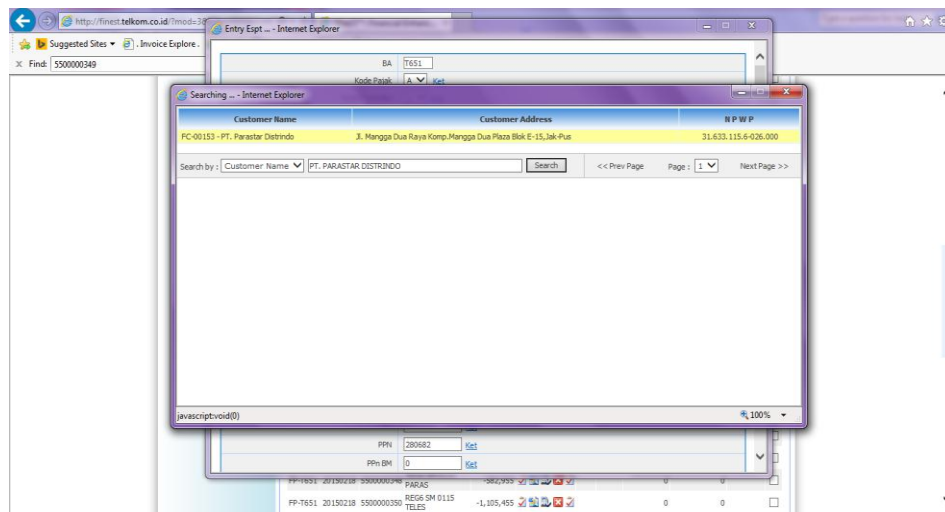
Field	Value	Action
BA	T651	
Kode Pajak	A	Ket
Kode Transaksi	2	Ket
Kode Status	1	Ket
Kode Dokumen	1	Ket
Flag VAT	0	Ket
NPWP Lawan Transaksi		Ket
NAMA Lawan Transaksi		Cari Vendor Ket
ALAMAT Lawan Transaksi		
NO Dokumen	0100021556022661	Ket
Jenis Dokumen	0	Ket
No. Seri Faktur Yang Diganti / Diretur		Ket
Jenis Dokumen yang Diganti / Diretur		Ket
Tanggal Faktur	18/02/2015	(format : dd/mm/yyyy)
Tanggal SSP Masa		Ket
Masa Pajak	02	Ket
Tahun pajak	2015	Ket
Pembetulan	0	Ket
Harga Total		Ket
Dikori		Ket
DRP	1381820	Ket
PPN	138182	Ket
PPn BM	0	Ket

At the bottom of the form, there is a summary table:

FF-T651	20150218	5500000354	REG6 SM 0115	TELES	-944,170	✓	T651	Marus	9,441,700	944,170	FC-00238
50-76651	20150218	5500000354	REG6 SM 0115		-138 182						

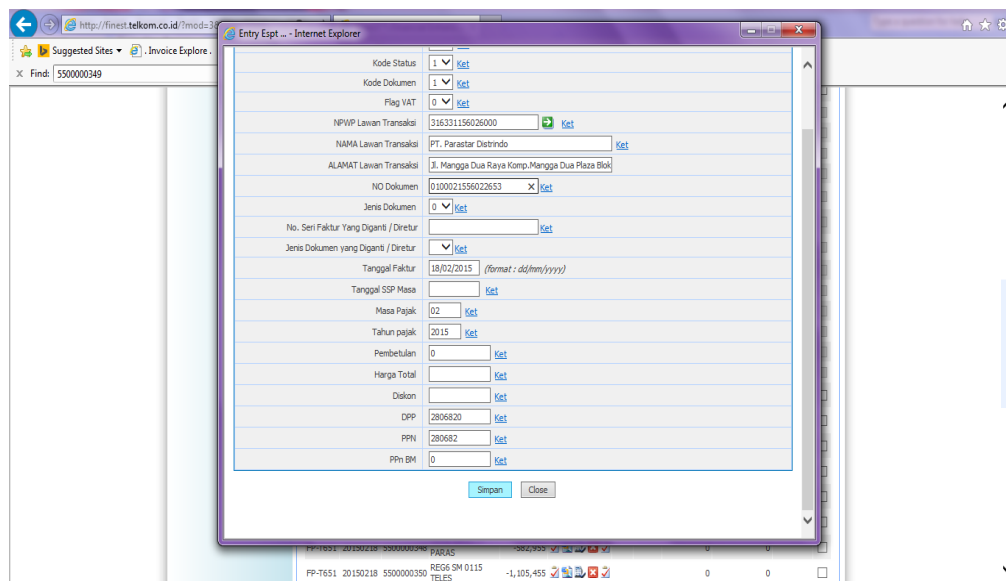
9. Pada “Search by”, pilih customer name → masukkan nama vendor yang dicari → klik Search. Bila sudah ketemu, klik pada data vendornya.

Gambar 3.23. – Tampilan Pilihan Vendor



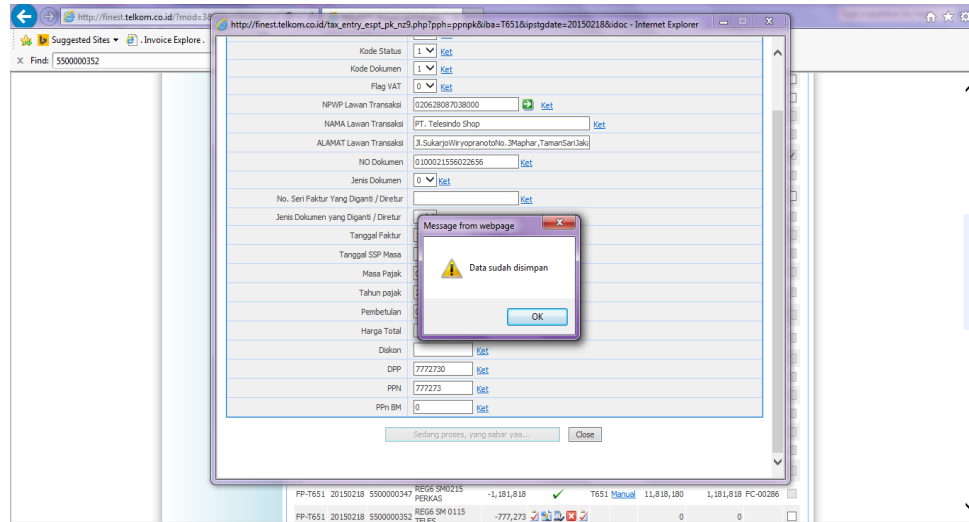
10. Maka kotak NPWP, Nama dan Alamat Lawan Transaksi serta No. Dokumen dan tanggal faktur telah terisi secara otomatis, setelah itu klik simpan.

Gambar 3.24. – Tampilan Data Sudah Terisi Lengkap



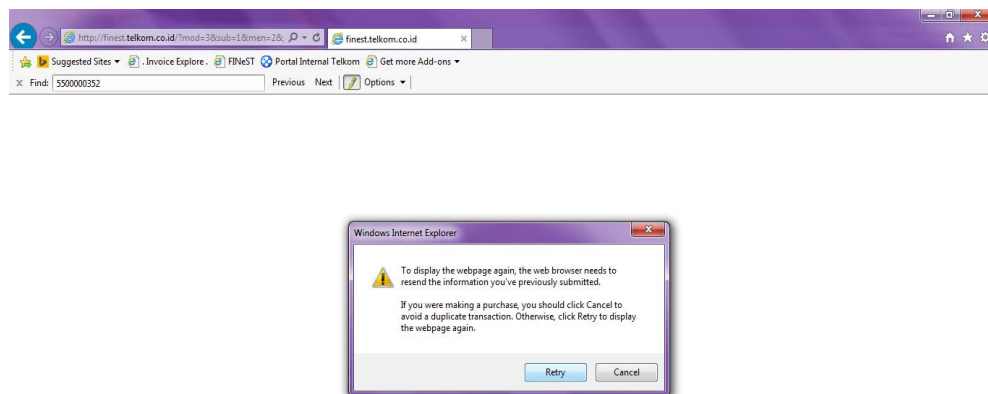
11. Klik OK

Gambar 3.25. – Simpan Data



12. Klik Retry

Gambar 3.26. – Penyimpanan Data Sukses

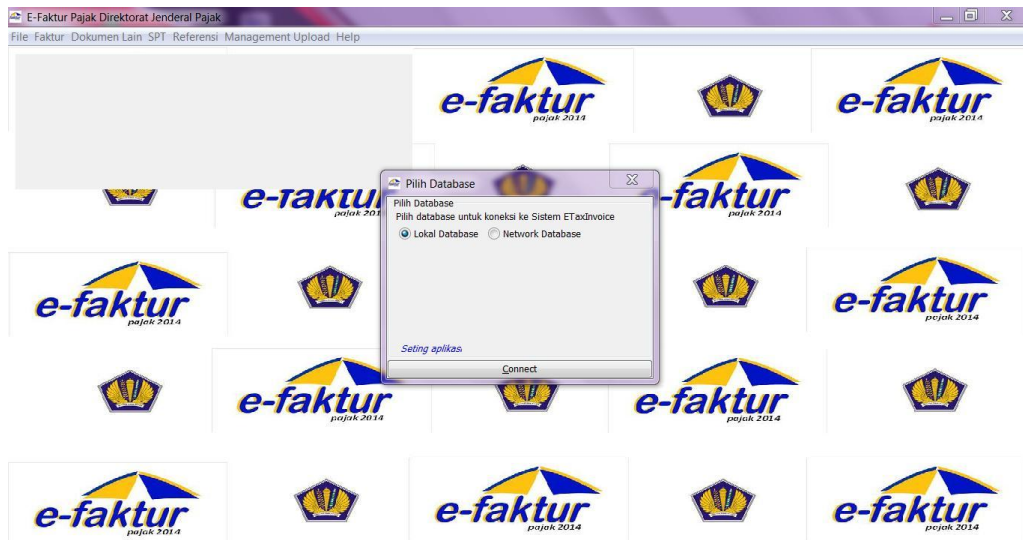


13. Selesai, lanjutkan dengan data selanjutnya.

3) Detail langkah upload data ke E-Faktur

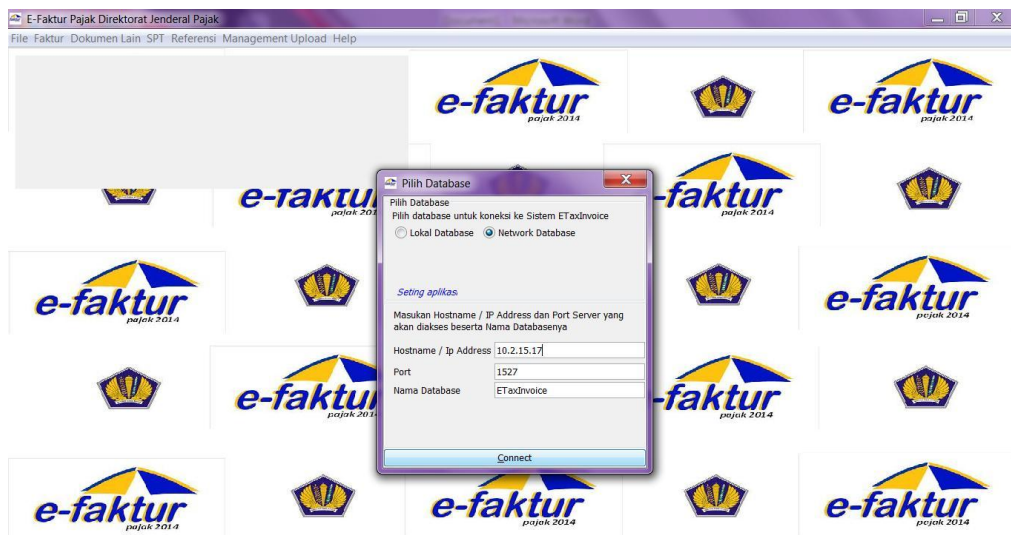
1. Buka aplikasi E-Faktur, lalu akan muncul tampilan seperti berikut.

Gambar 3.27. – Tampilan Awal E-Faktur



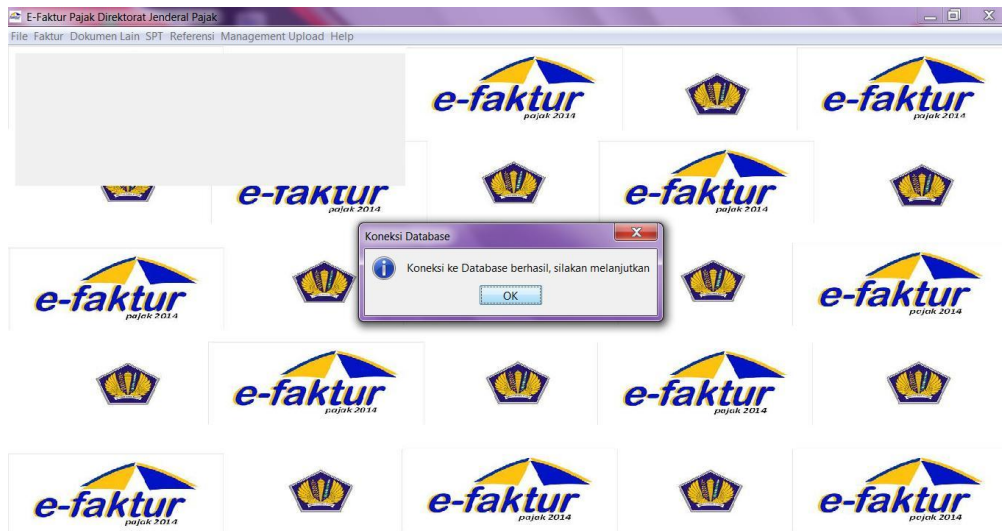
2. Klik Network Database, lalu klik Connect

Gambar 3.28. – Network Database



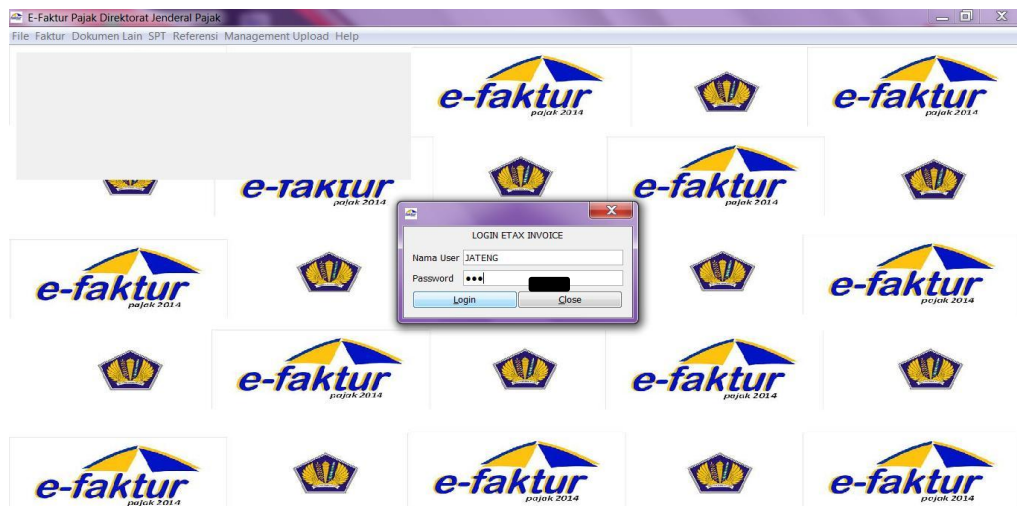
3. Akan muncul tampilan seperti berikut, tanda berhasil masuk ke aplikasi E-Faktur. Klik OK.

Gambar 3.29. – Tampilan Sesudah Connect



4. Melakukan Login dengan memasukkan username dan password, lalu klik Login.

Gambar 3.30. – Login E-Faktur



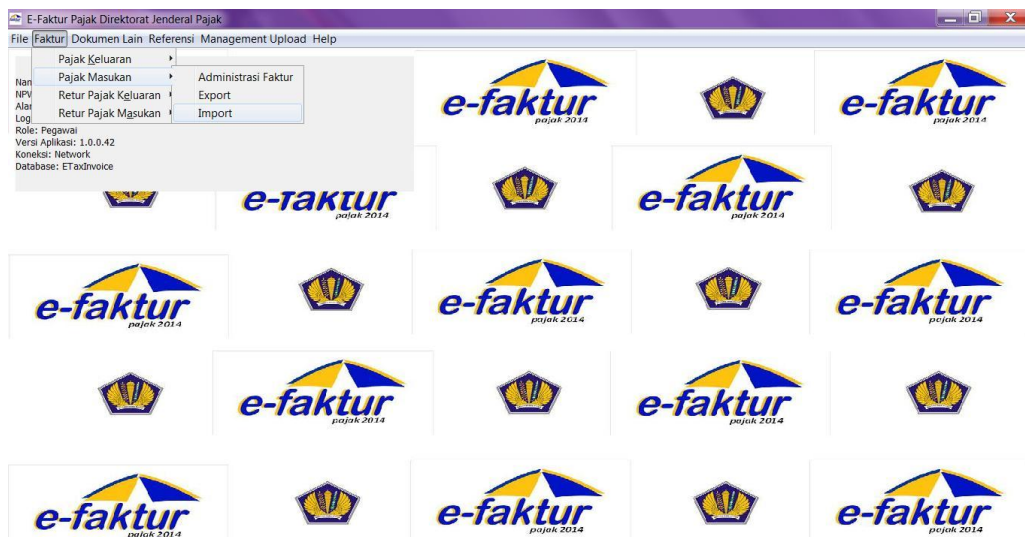
5. Akan muncul tampilan seperti berikut.

Gambar 3.31. – Tampilan Login



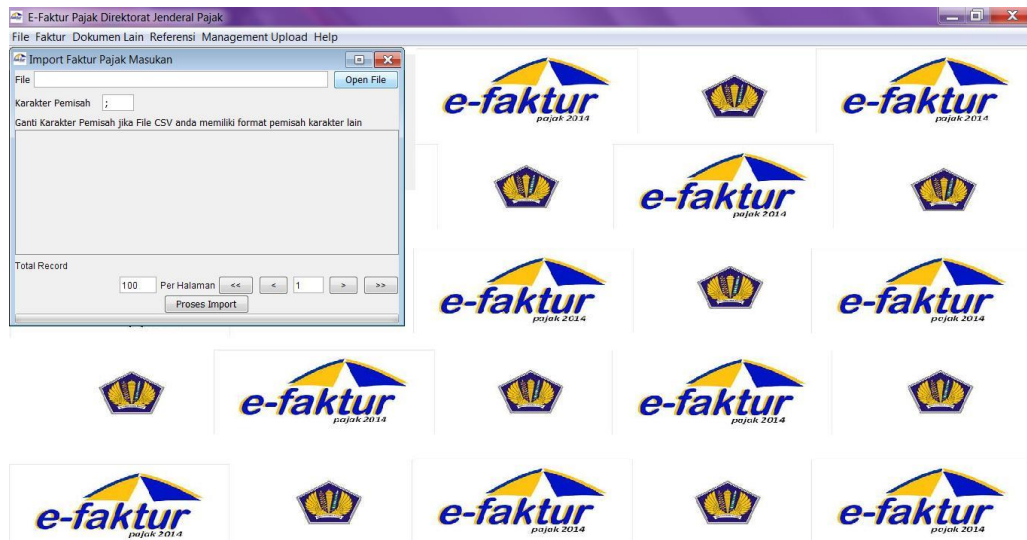
6. Untuk mengupload data pajak masukan, klik faktur, pilih pajak masukan, lalu import.

Gambar 3.32. – Tampilan Pilihan E-Faktur



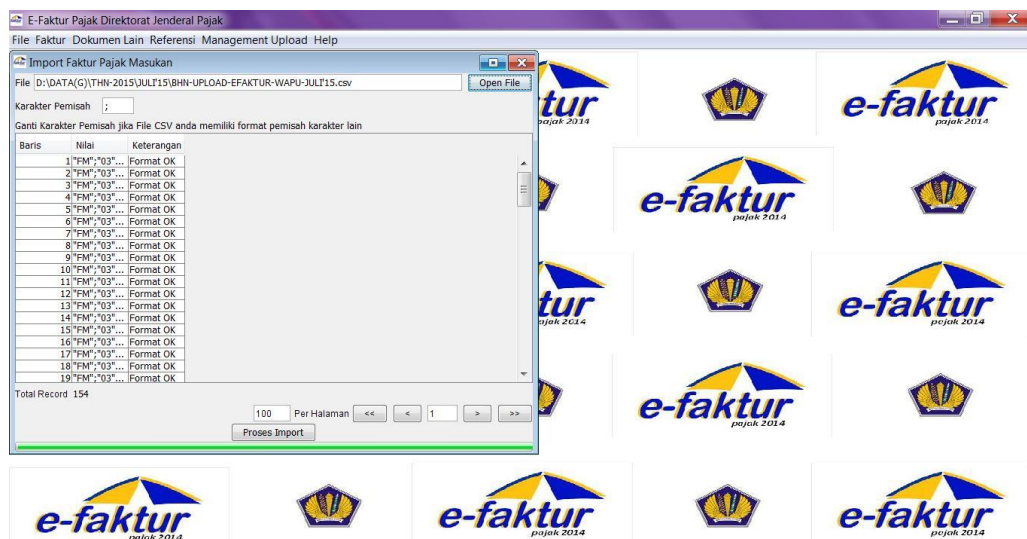
7. Ganti karakter pemisah menjadi titik-koma (;) lalu pilih file yang akan kita upload.

Gambar 3.33. – Ganti Karakter Pemisah

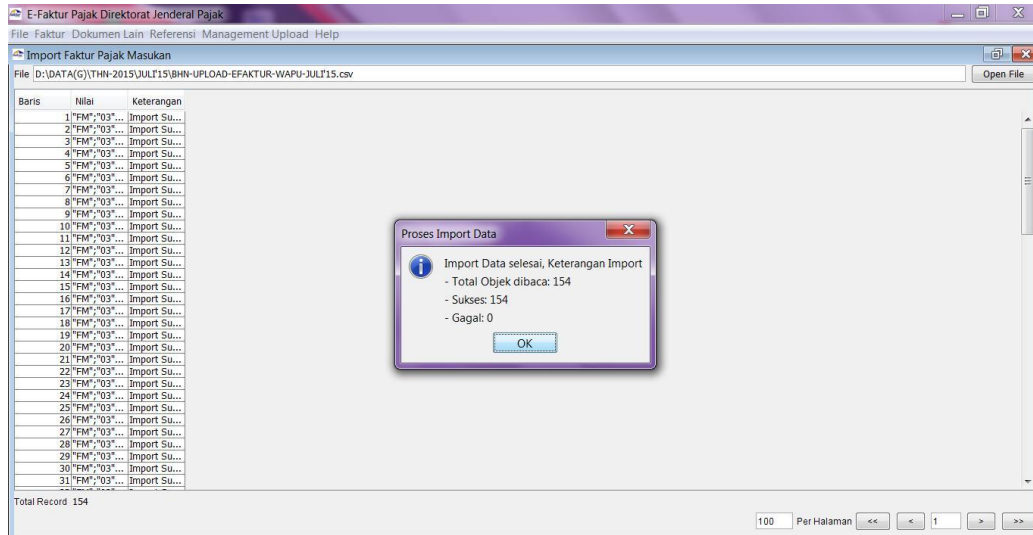


8. Jika data yang akan diupload sudah sesuai format yang dianjurkan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

Gambar 3.34. – Tampilan Data E-Faktur sudah Di Upload

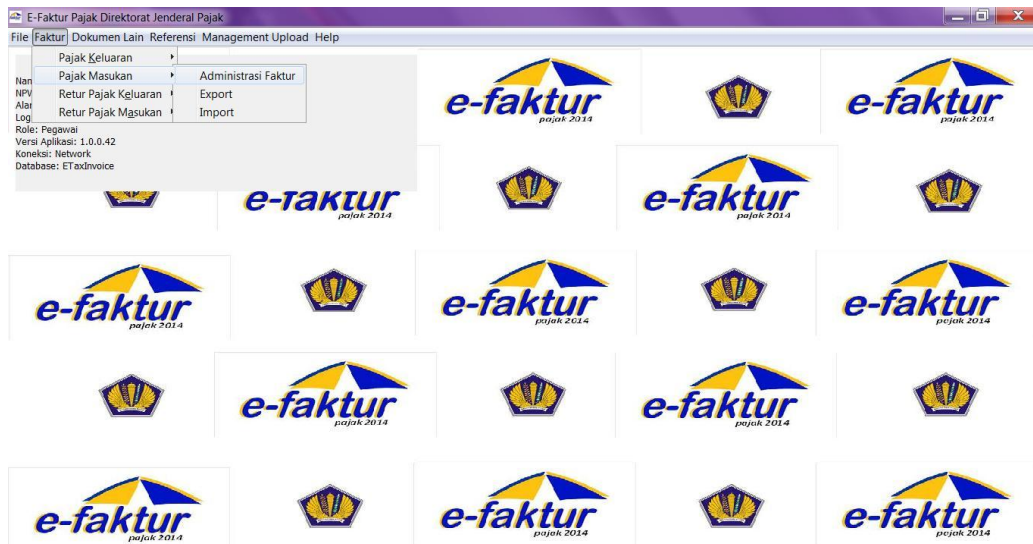


Gambar 3.35. – Data E-Faktur Sukses Upload



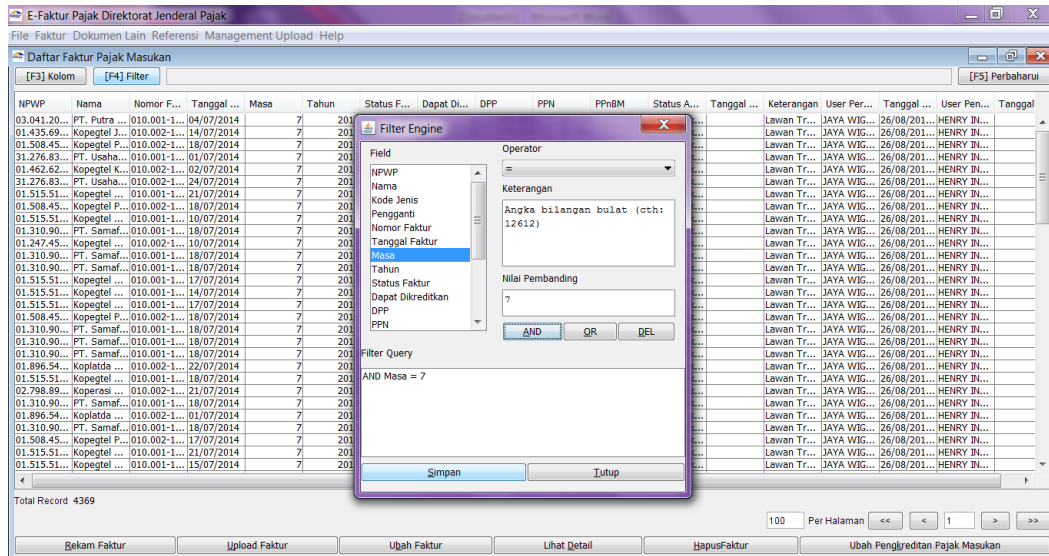
9. Untuk melihat hasil beserta status faktur yang tadi telah di-upload, klik tab faktur, Pajak Masukan, lalu Administrasi Faktur.

Gambar 3.36. – Melihat Hasil dan Status Data



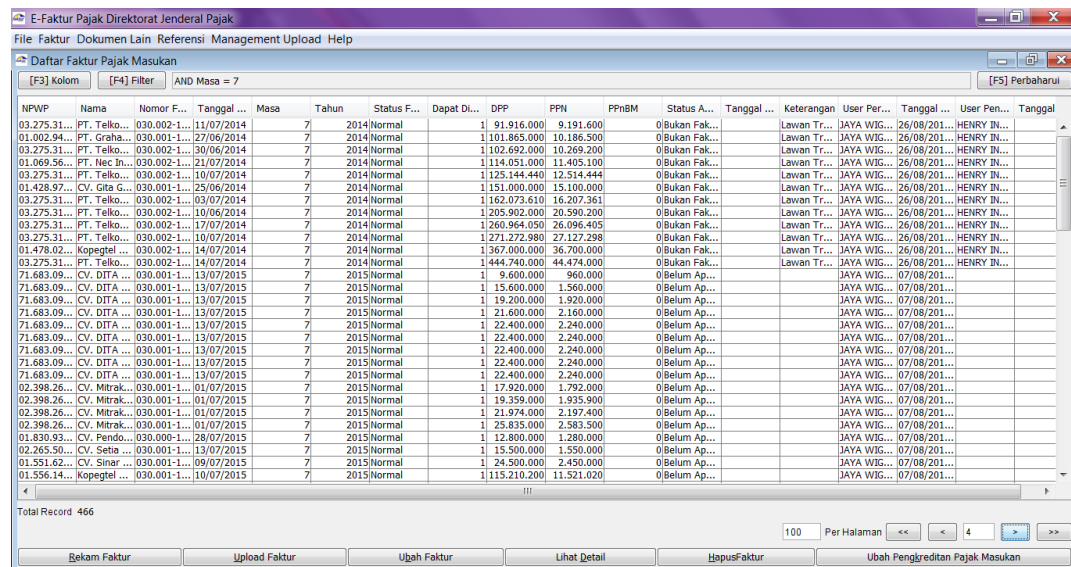
10. Klik [F5] Perbaharui, lalu klik [F4] Filter. Pilih Masa, lalu masukkan angka bulan untuk kolom Nilai Pembanding, klik AND, lalu Simpan.

Gambar 3.37. – Mencari Data yang diupload



11. Lalu akan muncul tampilan data faktur sesuai dengan masa yang diminta

Gambar 3.38. – Tampilan Data yang Diupload

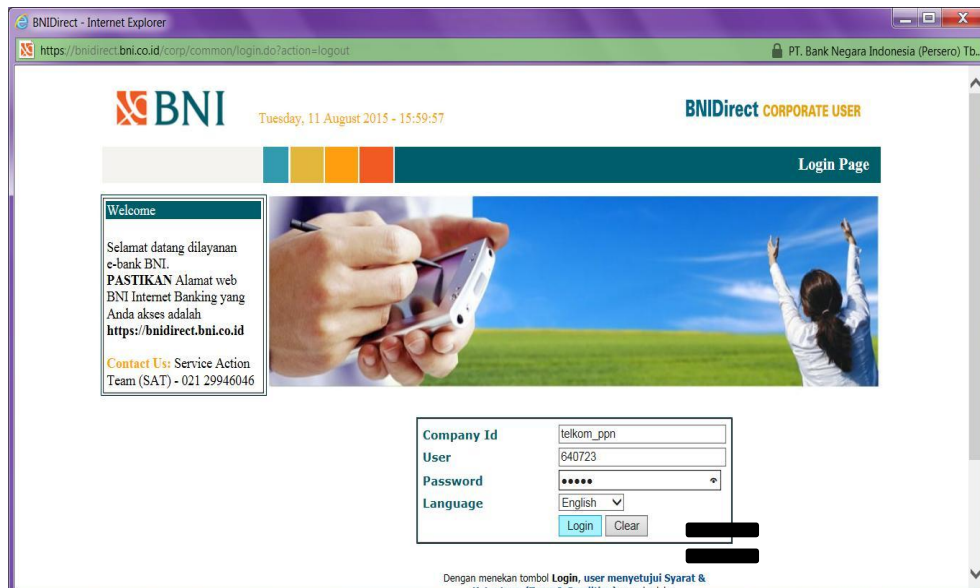


12. Jika ingin menyimpan datanya, langsung copy dari data di atas dengan cara blok data yang dibutuhkan, lalu paste ke excel.

4) Detail langkah upload data ke BNI

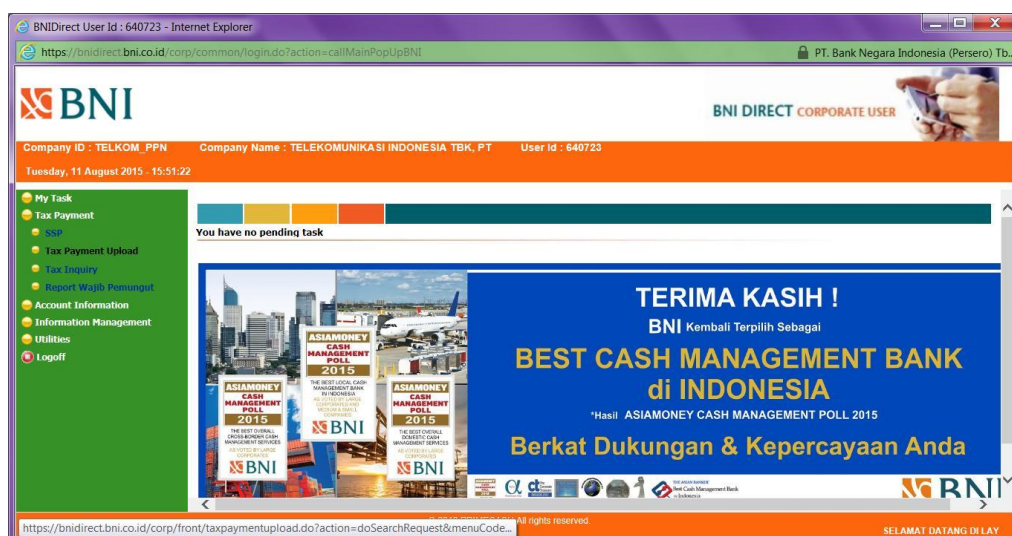
1. Buka sistem BNI Direct, bisa diakses melalui google dengan keyword: BNI Corporate Banking
2. Masukkan company ID, user, dan password. Login

Gambar 3.39. – Tampilan Awal BNI Direct



3. Pilih Tax Payment lalu Tax Payment Upload.

Gambar 3.40. – Pilihan Menu BNI Direct



4. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk upload, klik button add.

Gambar 3.41. – Pengisian Data

BNI Direct Corporate User interface showing the 'Tax Payment Upload' form. The form includes fields for File Name, Tax Form (set to ALL), and Date Range (11/08/2015 to 11/08/2015). There are 'Add' and 'Search' buttons at the bottom right of the form area.

5. Untuk mengecek status data upload, isi data range dengan tanggal upload, lalu klik button search. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik dua kali pada data upload yang muncul.

Gambar 3.42. – Data Yang Telah Dipload

BNI Direct Corporate User interface showing the 'Tax Payment Upload' form with a table of uploaded data. The table has columns for File Upload, Tax Form, and Created Date. One entry is visible: WAPU_JAT&DIY_JUL15_ETAX_20150809_140308.csv, SSP, 09-Aug-2015 14.07.40. There are 'Add', 'Search', and 'Delete' buttons.

File Upload	Tax Form	Created Date
WAPU_JAT&DIY_JUL15_ETAX_20150809_140308.csv	SSP	09-Aug-2015 14.07.40

Gambar 3.43. – Daftar Data Upload

Company ID : TELKOM_PPN Company Name : TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT User Id : 640723

Tuesday, 11 August 2015 - 15:53:14

Tax Payment Upload

Debited Account
201170554 - TELKOM - FBCC, PT (IDR)

File Detail

Tax Form	: SSP
File Format	: CSV
File Upload	: WAPU JAT&DIY JUL15_ETAX_20150809_140308.csv
File Description	: WAPU JULI 2015
Total Record	: 154
Total Amount	: IDR 3,593,257,255.00
Total Debit Amount	: IDR 3,593,257,255.00

Transaction

Transaction Type	: Summary
------------------	-----------

Instruction Mode

Forward Value	: 14-Aug-2015
Session Time	: 10:00 - Session 5

Status

Status	: ALL
--------	-------

Transaction Details

No	NPWP	Tax Payer Name	Host Name	Tax Payer	Host Address	Tax Payer	Host City	Tax Object	Tax Object	MAPI/Account Code	Deposit Type
----	------	----------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------------	--------------

© 2010 PRIMECASH All rights reserved. SELAMAT DATANG DI LAYANAN BNI DIRECT

6. Jika muncul tulisan berwarna merah, artinya format dan data yang kita upload sudah benar.

Gambar 3.44. – Tampilan Data Sukses Upload

Company ID : TELKOM_PPN Company Name : TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT User Id : 640723

Tuesday, 11 August 2015 - 15:53:40

Tax Payment Upload

47	015155153526000	Kopegtel Solo	PEGAWAI PERUMTEL SOLO	JL MAYOR KUSMANTO NO.1, KEDUNGLUMBU	SURAKARTA	411211 - Pajak PPN Dalam Negeri	900 - Pemungu PPN Dalam Negeri
48	015155153526000	Kopegtel Solo	PEGAWAI PERUMTEL SOLO	JL MAYOR KUSMANTO NO.1, KEDUNGLUMBU	SURAKARTA	411211 - Pajak PPN Dalam Negeri	900 - Pemungu PPN Dalam Negeri
49	015155153526000	Kopegtel Solo	PEGAWAI PERUMTEL SOLO	JL MAYOR KUSMANTO NO.1, KEDUNGLUMBU	SURAKARTA	411211 - Pajak PPN Dalam Negeri	900 - Pemungu PPN Dalam Negeri
50	015155153526000	Kopegtel Solo	PEGAWAI PERUMTEL SOLO	JL MAYOR KUSMANTO NO.1, KEDUNGLUMBU	SURAKARTA	411211 - Pajak PPN Dalam Negeri	900 - Pemungu PPN Dalam Negeri

Page 1 Of 4 | First | Prev | Next | Last

Submit Back

ANG DI LAYANAN BNI DIRECT © 2010 PRIMECASH All rights reserved.

7. Jika sudah berwarna merah semua, copy data lalu paste di excel.
8. Print, lalu gunakan untuk mencocokkan dengan faktur fisik, sebelum submit. Agar data yang kita submit merupakan data yang benar.

9. Jika sudah sesuai dengan faktur pajak, klik submit untuk melakukan pembayaran.

Demikian prosedur penyelesaian Pajak Masukan (PPN Masukan) pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, mulai dari menerima faktur pajak (bukti fisik) hingga melakukan pembayaran melalui BNI TAX dan pelaporan melalui E-Faktur.

3.3 Analisis dan Pembahasan

3.3.1 Hambatan yang Ditemui Dalam Prosedur Penyelesaian Pajak Masukan

Dalam prosedur penyelesaian pajak masukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, langkah pertama adalah penanganan faktur pajak secara manual, yaitu dengan membaca dan menulis data yang ada di faktur pajak (bukti fisik) secara manual dan menyalin data tersebut ke aplikasi Finest. Setelah data di input maka laporan dari finest akan didownload dan di cek secara manual untuk menemukan kesalahan input data, apabila seluruh data yang diinput sudah sesuai dengan faktur pajak maka selanjutnya akan dibuat data upload untuk keperluan pembayaran.

Pemeriksaan manual seperti ini memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, karena jika terjadi kesalahan harus diurus ke kantor pajak dan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lama. Sedangkan untuk pengumpulan faktur pajak dari daerah-daerah Jateng & DIY juga memerlukan penanganan tersendiri, biasanya faktur pajak dikirim lewat pos tercatat memerlukan waktu 2-3 hari sehingga waktunya sangat tidak efisien.

Hambatan kedua yang sering terjadi yaitu ketika adanya permintaan dari Kantor Dirjen Pajak untuk menyerahkan data transaksi (faktur pajak) yang terjadi beberapa tahun lalu dalam rangka verifikasi data, karena vendor terkait tidak mampu menyerahkan data yang diminta. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus

membongkar dan mencari faktur pajak fisik pada tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya sangat banyak.

3.3.2 Alternatif Pemecahan Hambatan pada Prosedur Penyelesaian Pajak Masukan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, untuk mengantisipasi kesalahan input yang sering terjadi pada proses rekonsiliasi manual, sebaiknya melakukan input data dengan cara *scanning barcode*. *Scanning barcode* ini berfungsi untuk mengetahui keakuratan dan keabsahan suatu faktur pajak. Pada faktur pajak, terdapat sebuah barcode yang letaknya berada di kiri bawah faktur pajak. Barcode tersebut berisi data lengkap sesuai dengan faktur pajak fisik. Ketika melakukan input data dengan cara *scanning barcode*, data yang ada di dalamnya akan dimanfaatkan kembali untuk tujuan pelaporan kemudian akan masuk ke dalam data berjalan sebagai bahan untuk pembayaran pajak melalui BNI Tax (sistem pembayaran Pajak via BNI) dan pelaporan pajak melalui aplikasi E-Faktur ke direktorat dirjen pajak untuk pelaporan PPN. *Scanning barcode* dapat dilakukan melalui aplikasi scan berbasis android.

Dengan *scanning barcode* yang terdapat pada faktur fisik, maka seluruh data yang ada di faktur pajak tersebut akan tersalin secara otomatis sebagai suatu data yang akurat sesuai dengan kebenaran yang ada pada faktur pajak, sehingga kesalahan baca, tulis, dan input dapat diminimalkan. Selain itu, dengan melakukan *scanning barcode* pada faktur pajak maka dapat menghemat waktu pengerjaan, yang sebelumnya memakan waktu untuk penyelesaian berhari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam saja sampai proses akhir yaitu pembayaran melalui BNI Tax bahkan dapat otomatis tercatat sampai dengan membuat laporan secara elektronik ke kantor pajak melalui aplikasi E-Faktur.

Untuk permasalahan yang kedua, sebaiknya melakukan pengarsipan faktur pajak dengan dua cara, yaitu disimpan secara fisik dan juga secara digital dengan melakukan scan faktur pajak. Sehingga ketika terdapat kejadian yang mengharuskan mencari faktur dari tahun-tahun yang lalu,

pihak yang bersangkutan dapat menemukan faktur pajak secara lebih efektif dan efisien melalui komputer dengan fitur 'search' tanpa harus membongkar faktur fisik tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya sangat banyak. Apabila hal ini sudah diterapkan, akan banyak kelebihan dan manfaat yang dirasakan, karena mencari faktur pajak dengan cara digital ini dapat menghemat waktu serta tenaga.